



**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jambi**



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan strategis dan pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi serta kebijakan pembangunan nasional.. Di tengah dinamika global dan pergeseran tren wisata, dokumen ini menitikberatkan pada upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan serta pemajuan kebudayaan sebagai akar identitas daerah.

Renstra ini juga sebagai wujud komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Melalui Renstra ini diharapkan pengembangan kebudayaan daerah dapat semakin memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Jambi, sementara sektor pariwisata mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dengan fokus utama pada Pelestarian Nilai Budaya: Memperkuat ekosistem kebudayaan dan perlindungan warisan sejarah, Peningkatan Daya Saing Destinasi: Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis digital dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif: Mendorong masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam rantai nilai pariwisata.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana ini sangat bergantung pada kolaborasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi mewujudkan visi Provinsi Jambi yang mandiri dan berdaya saing melalui sektor kebudayaan dan pariwisata.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Jambi,

2025

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19710510 199703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	7
1.4	Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	29
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	33
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
	A. Permasalahan Regional Terkait Disbudpar	34
	B. Permasalahan Lingkungan Hidup yang Relevan dengan Disbudpar	37
	C. Permasalahan Sektoral	39
2.2.2	Isu Strategis.....	42
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	46
3.1.1	Sasaran Renstra.....	46
3.2.	Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2026-2029.....	50
3.3.	Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2026-2039	52
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN PARIWISATA.....	55
4.1.	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029	55
4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.....	77
4.3.	Indikator Kinerja Utama	86
4.4.	Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	88
BAB V	PENUTUP	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disbudpar Provinsi Jambi

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara tahun 2021-2024
- Grafik 2.2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2021-2024
- Grafik 2.3 Jumlah pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan tahun 2021-2024
- Grafik 2.4 Jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan tahun 2021-2024
- Grafik 2.5 Jumlah karya budaya tahun 2021-2024

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
- Tabel 2.2 Kelompok Sasaran Layanan Pada Sektor Urusan Kebudayaan
- Tabel 2.3 Kelompok Sasaran Layanan Pada Sektor Urusan Pariwisata
- Tabel 2.4 Kelompok Penerima Layanan Lintas Sektor / Lintas Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
- Tabel 2.5 Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029
- Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama
- Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa

Tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu: (a) Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusat-pusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan. (b) Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri. (c) Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang menjadi landasan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025–2030 dilakukan dalam rangka menjabarkan visi, misi, serta arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2030 dan selaras dengan arah jangka panjang pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045.

Secara umum, dokumen Renstra ini mendasari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dalam 2 urusan utama dan 1 sub urusan, yaitu urusan kebudayaan, urusan pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif. Ketiganya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kearifan lokal, peningkatan daya saing nasional dan global, serta penguatan identitas budaya masyarakat di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Definisi Renstra mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja, serta kerangka pendanaan indikatif. Renstra menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja tahunan, serta menjadi instrumen evaluasi kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai kebijakan Kementerian PANRB.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disusun melalui tahapan atau proses Persiapan penyusunan rancangan awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renstra-PD, Perumusan Rancangan Akhir Renstra-PD dan Penetapan Renstra-PD. Dengan adanya Renstra Disbudpar Provinsi Jambi maka upaya untuk mengukur kinerja baik ditingkat sasaran (*dampak/impact*), Program Hasil (*outcome*) dan di tingkat Kegiatan (*keluaran/output*) secara terukur dapat terlaksana.

Renstra ini disusun untuk menjalankan amanat dari peraturan dan regulasi perencanaan dan kelembagaan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD;

Selain itu, Renstra ini disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi terkait dari berbagai sektor, diantaranya yaitu UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Nilai strategis Renstra ini terletak pada posisinya sebagai (1) Instrumen penjabaran misi pembangunan daerah pada sektor kebudayaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif; (2) Landasan teknokratis bagi penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas berbasis potensi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing Jawa Timur di tingkat nasional dan global; (3) Kerangka akuntabilitas dan transparansi publik atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Disbudpar Provinsi Jambi; dan (4) Wadah koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam pembangunan kebudayaan, pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi kreatif dalam upaya mendukung pembangunan nasional.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, dokumen ini juga menjadi bagian penting dalam integrasi perencanaan lintas dokumen, seperti RPJMD, KLHS, RTRW, dan RPJMN 2025–2029, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan agenda Indonesia Emas 2045.

Proses penyusunan rencana strategis ini mengakomodir indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi (RPJMD). Rencana strategis ini merupakan suatu dokumen berisi uraian lebih lanjut dari visi dan misi, tujuan strategis, sasaran strategis, serta arah kebijakan tahun 2025 s.d. 2030 yang diimplementasikan dalam program kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Adapun penjelasan untuk menggambarkan hubungan/ keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. **Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD**, Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD
2. **Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L** Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah
3. **Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota**. Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra provinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi
4. **Keterkaitan Renstra OPD dengan Rencana Kerja (Renja)**, Merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan idiil dalam penyusunan Renstra ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, antara lain:

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
 9. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi

- Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 33. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Taman Budaya Jambi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 34. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 45);
 35. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi;
 36. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 37. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan prioritas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Jambi tahun 2025-2029. Program dan kegiatan dalam Renstra ini merupakan implementasi dari Ripparprov Provinsi Jambi, RPJMD dan RPJP Jambi yang telah diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan

pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menyusun rencana kerja SKPD dan rencana program kegiatan strategis yang disusun oleh masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sehingga konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan dapat terjaga.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Renstra Disbudpar Provinsi Jambi) Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur Jambi yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Ripparda dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antara SKPD Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait, dalam koridor pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi;
3. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Bidang/UPTD lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah bidang kebudayaan dan pariwisata serta pengelolaannya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2026-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan secara ringkas pokok bahasan masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menjelaskan pihak yang menjadi tujuan utama dan menerima manfaat langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan strategis baik yang muncul dari dinamika internal penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata maupun dari pengaruh eksternal dan isu terkait lingkungan hidup.

2.2.2. Isu Strategis

Merumuskan kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung (isu global, nasional dan regional) untuk ditindaklanjuti selama 5 tahun ke depan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Menjabarkan tujuan dan pernyataan spesifik mengenai hasil yang ingin dicapai sesuai urusan kebudayaan dan pariwisata serta sub urusan ekonomi kreatif yang selaras dengan RPJMD.

3.2. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Menjelaskan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

3.3. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun

Menjelaskan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas lengkap dengan target indikator kinerja, waktu pelaksanaan, dan pagu pendanaan indikatif untuk periode tahun 2025 – 2030.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan berupa penegasan kembali akan pentingnya dokumen Renstra sebagai pedoman operasional serta arahan

pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan serta pembaruan dokumen sesuai dinamika pembangunan daerah dan nasional.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedudukan dinas tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

2.1.1. Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam mendukung dan menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu (1) Museum Siginjei, (2) Taman Budaya Jambi dan (3) Destinasi Pariwisata. Tugas Pokok UPTD ini diatur dalam . Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Taman Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan urusan bidang pemerintahan sebagaimana disebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki unit kerja sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tugas:

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, menganalisa, mengarahkan dalam melakukan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. mengelola surat menyurat, yang meliputi arsip dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
- b. menyiapkan perlengkapan pertemuan/rapat termasuk upacara-upacara;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- d. menyusun instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- e. menyusun dan mengelola mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, baik yang bertugas di dinas maupun UPTD;
- f. membuat rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan ASN;
- g. menyusun rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan penjenjangan bagi ASN;

- h. mengatur penyiapan absen pegawai baik pagi maupun siang;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan disiplin;
- j. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Keuangan dan Aset

Tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- b. mengelola urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai di lingkup Dinas;
- c. mengelola urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik daerah;
- d. mengelola urusan barang persediaan;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Subbagian Program

Tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan, pengelolaan dan penyajian data;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni

Tugas:

Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni mempunyai tugas membantu Dinas menyiapkan regulasi, fasilitasi, bahan-bahan dan data kelengkapan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, pelestarian, pembinaan, perlindungan, pengembangan, pengawasan, pemanfaatan, koordinasi dan kerjasama, serta penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan nilai budaya dan seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan dan data kebudayaan sebagai kelengkapan informasi dan analisa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pengembangan nilai budaya dan seni serta pelaksanaan objek pemajuan kebudayaan;
- b. penyiapan bahan-bahan pelestarian, pembinaan, perlindungan pengawasan, dan pemanfaatan serta rencana operasional pengembangan nilai budaya dan seni;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pelestarian, koordinasi, kerjasama dan monitoring di bidang pengembangan nilai budaya dan seni;
- d. penyampaian bahan informasi, pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Sejarah dan Purbakala

Tugas:

Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka mengumpulkan bahan, menginventarisir hasil kajian analisis, pendataan, untuk bahan konsep rumusan kebijakan pengelolaan, pendokumentasian, pelestarian, pemberdayaan, pemanfaatan, dan perlindungan aset serta peninggalan terkait sejarah, purbakala dan permuseuman, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana pengumpulan, inventarisir hasil kajian analisa data, yang berkaitan dengan kegiatan Bidang Sejarah dan Purbakala;
- b. penyiapan rumusan dan konsep kebijakan pembinaan, pelestarian, pendokumentasian dan rencana operasional di Bidang Sejarah dan Purbakala;
- c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama lintas sektoral dalam menunjang kegiatan di Bidang Sejarah dan Purbakala;
- d. penyiapan rumusan dan konsep bahan kebijakan pengolahan aset serta peninggalan sejarah, purbakala, dan permuseuman sebagai langkah pelestarian dan pengembangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Bidang Sejarah dan Purbakala;
- e. penyiapan dan pelaksanaan pendokumentasian di Bidang Sejarah dan Purbakala;

- f. pembuatan laporan kegiatan di Bidang Sejarah dan Purbakala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. penyampaian bahan informasi, pertimbangan dan saran kepada kepala Bidang Sejarah dan Purbakala; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Tugas:

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Dinas melakukan perumusan dalam rangka kebijakan teknis, memfasilitasi, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata serta pengembangan sumber daya pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. penyusunan rencana program kerja tahunan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata
- d. pengorganisasian seluruh kegiatan pada bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. penganalisaan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- g. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
- h. penyiapan bahan informasi dan investasi pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan destinasi dan infrastruktur;
- j. pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- k. penyampaian bahan informasi, pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas; dan

- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Pemasaran Pariwisata

Tugas:

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Dinas mempersiapkan perumusan dalam rangka kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi strategi promosi pariwisata, pengembangan pasar dan kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota dan stakeholders
- b. pariwisata untuk pengembangan pasar;
- c. perumusan kebijakan segmen pasar, strategi pemasaran dalam dan luar negeri;
- d. penguatan sarana promosi berbasis media/teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan promosi, publikasi dan pelayanan informasi pariwisata;
- e. pelaksanaan promosi kepariwisataan di dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan pelaporan tugas bidang pemasaran pariwisata kepada kepala Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tugas:

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi, penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, sarana dan prasarana, supervisi, pemantauan, analisis, dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis, pembinaan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan ekonomi kreatif;

- c. Fasilitasi dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan bahan rumusan kebijakan pengembangan produk inovatif dan tata kelola ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan potensi sumber daya, serta industri ekonomi kreatif;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif.;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif kepada kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. UPTD Museum Siginjei

Museum Siginjei Jambi adalah museum umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional dan nasional.

Fungsi:

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pengenalan dan menyebarluaskan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Pelaksanaan perawatan/pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah
- e. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepala subbagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

j. UPTD Taman Budaya Jambi

Tugas:

Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

Fungsi :

- a. Pelaksana kegiatan labor berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi
- b. Pelatihan dan bimbingan Seni budaya
- c. Pelaksana pameran dan pertunjukan seni budaya
- d. Pelaksana festival, lomba dan sayembara seni budaya
- e. Pelaksanaan ceramah, sarasehan, lokakarya, workshop, diskusi seminar dan temu karya.
- f. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi karya seni budaya.
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan penunjang kesenian
- h. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah UPTD.
- i. Pelaksaaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

j. UPTD Destinasi Pariwisata

Tugas:

UPTD mempunyai tugas membantu sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada Dinas di bidang destinasi pariwisata yang terdiri dari Kawasan Stadion Swarna Bhumi, Kawasan Islamic Centre, Arena eks STQ, Tanggo Rajo dan Jembatan Gentala Arasy, Taman Anggrek, Danau Sipin, Tugu Juang, dan Taman Putri Selaras Pinang Masak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

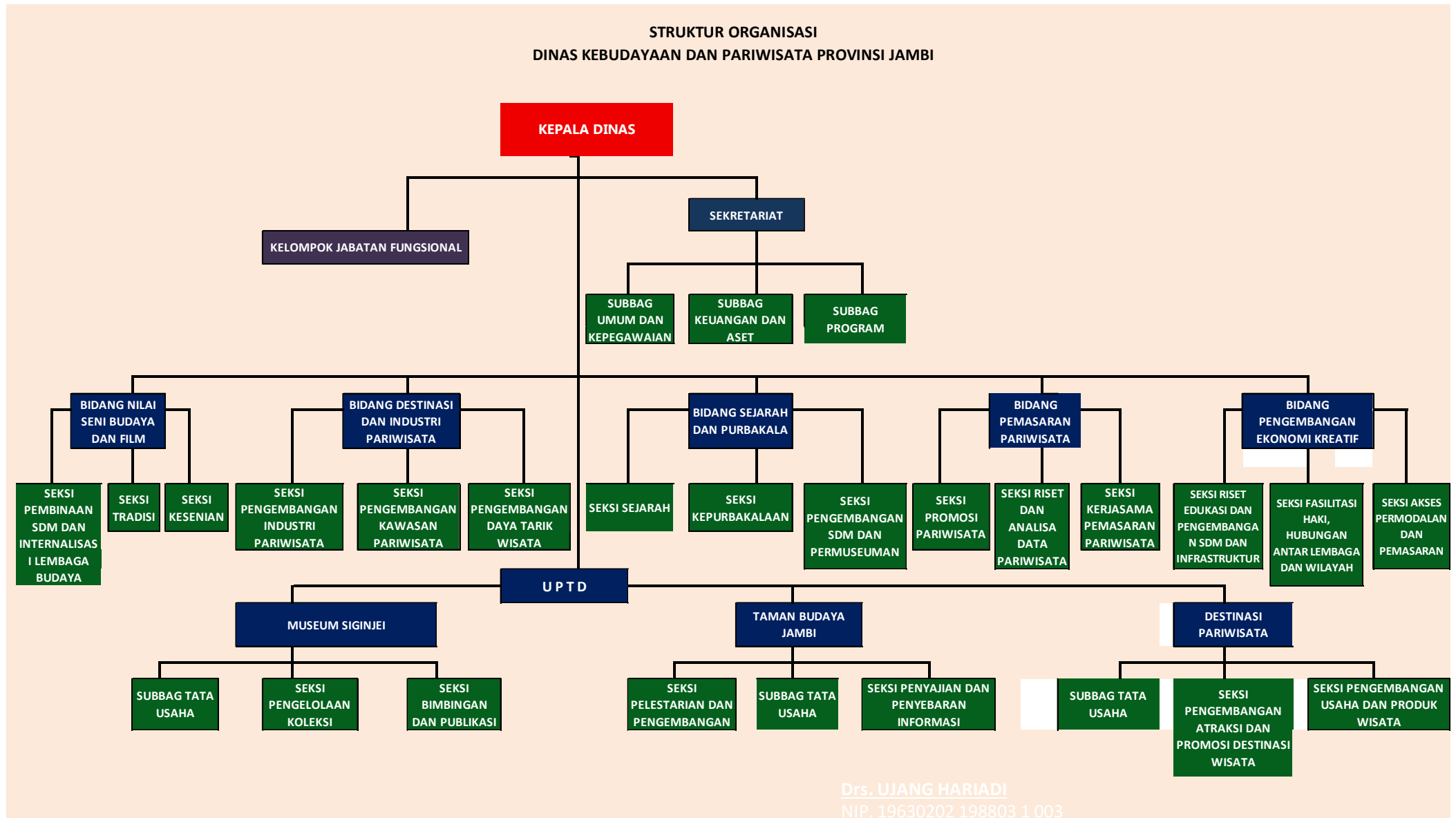
Fungsi :

Hubungan antar unit kerja ini dapat dilihat dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan dan kegiatan tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan tata usaha, pengembangan atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;

- e. Pembinaan dan pengembangan kegiatan ketatausahaan, atraksi dan promosi destinasi wisata, serta pengembangan usaha dan produk wisata;
- f. Pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan pihak lainnya dalam rangka pengembangan atraksi dan promosi, pengembangan usaha dan produk wisata, serta keamanan destinasi pariwisata;
- g. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disbudpar Provinsi Jambi



2.1.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari pejabat manajerial, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, dan tenaga pendukung lainnya. Dinas juga memiliki sarana prasarana gedung di dinas induk serta di Unit Pelaksana Teknis yang ditunjang dengan keberadaan aset untuk melaksanakan tugas teknis yang diampu.

Sumber daya yang dimiliki dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Data SDM aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per bulan April 2025:

a.1. SDM Aparatur Disbudpar Provinsi Jambi berdasarkan unit kerja dan jenis jabatan

NO	UNIT KERJA ESE II/ III	SUBBAG/SEKSI	JENIS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Sekretariat		Kepala Dinas	1
			Sekretaris	1
		Umum dan Kepegawaian	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	1
			Jabatan Pelaksana	4
		Keuangan	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	6
		Program	Jabatan Struktural	-
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	4
			Total	19
2	Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni		Kepala Bidang	1
		Seksi Tradisi	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	3
		Seksi Kesenian	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	1
		Seksi Pembinaan SDM dan Kelembagaan Budaya	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	2
			Total	10
3			Kepala Bidang	1

NO	UNIT KERJA ESE II/ III	SUBBAG/SEKSI	JENIS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Seksi Pengembangan Industri Pariwisata	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	3
		Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata	Jabatan Struktural	-
			Jabatan Fungsional	1
			Jabatan Pelaksana	1
		Seksi Pengembangan ODTW	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	-
			Jabatan Pelaksana	2
			Total	10
4	Bidang Sejarah dan Purbakala		Kepala Bidang	1
		Seksi Kepurbakalaan	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	2
		Seksi Sejarah	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	1
		Seksi Pengembangan SDM dan Permuseuman	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	-
			Total	7
5	Bidang Pemasaran Pariwisata		Kepala Bidang	1
		Seksi Kerjasama Pemasaran Pariwisata	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	2
		Seksi Promosi Pariwisata	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	3
		Seksi Riset dan Analisis Data Promosi	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	1
			Total	10
6	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		Kepala Bidang	1
		Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	1
		Seksi Riset Edukasi Pengembangan SDM dan Infrastruktur	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	1
		Seksi Fasilitas HKI, Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	2
			Total	8
7	Museum Siginjei		Kepala Museum	1
		Subbag Tata Usaha	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	6

NO	UNIT KERJA ESE II/ III	SUBBAG/SEKSI	JENIS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
8	Taman Budaya Jambi	Seksi Pengelolaan Koleksi	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Fungsional	5
			Jabatan Pelaksana	1
		Seksi Bimbingan dan Publikasi	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	8
			Total	24
			Kepala TBJ	1
		Subbag Tata Usaha	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	2
		Seksi Penyajian dan Penyebaran Informasi	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	2
		Seksi Pelestarian dan Pengembangan	Jabatan Struktural	1
			Jabatan Pelaksana	2
			Total	10
Jumlah ASN				98
Pegawai Tidak Tetap				32 (Dinas)
				31 (Museum)
				11 (TBJ)
				Total74

a.2. SDM Aparatur Disbudpar Provinsi Jambi berdasarkan golongan/ruang

No.	GOLONGAN/RUANG		JUMLAH
1.	IV d	- Pembina Utama Madya	2
2.	IV b	- Pembina Tk I	3
3.	IV a	- Pembina	8
4.	III d	- Penata Tk.I	44
5.	III c	- Penata	12
6.	III b	- Penata Muda Tk.I	14
7.	III a	- Penata Muda	4
8.	II d	- Pengelola Tk.I	4
9.	II c	- Pengelola	5
10.	II b	- Pengelola Muda Tk.I	2
			98

b. Sumber Daya Ase/Modal

Aset yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi adalah sebagai berikut, diambil pada triwulan II bulan Juli 2025.

b.1. Aset Berupa Tanah

No	Deskripsi Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Disbudpar	1.800.000 m ²	1980	Kantor Disbudpar	HIBAH	270.000.000	baik
2	Tanah Gedung Musuem Siginjai	3.837.000 m ²	1980	Museum Siginjai	HIBAH	575.550.000	baik
3	Tanah Gedung MPRJ	1.365.000 m ²	1980	MPRJ	HIBAH	204.750.000	baik
4	Tanah Gedung TBJ	1.500 m ²	1980	TBJ	HIBAH	225.000.000	baik

b.2. Aset Berupa Bangunan

No	Deskripsi Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	Kondisi
1	Bangunan Kantor Disbudpar	1.800.000 m ²	2001	Kantor Disbudpar	HIBAH	4.811.232.436	baik
2	Area Parkir Gedung Disbudpar	120 m ²	2015	Kantor Disbudpar	Pembuatan	199.000.000	baik
3	Gedung Musuem Siginjai	3.837.000 m ²	2007	Museum Siginjai	HIBAH	178.500.000	baik
4	Bangunan Rumah Penjaga	16 m ²	2008	Museum Siginjai	Pembuatan	29.750.000	baik
5	Pemb. Taman MNJ	60 m ²	2009	Museum Siginjai	Pembuatan	401.500.000	baik
6	Pemb. Rumah Jaga	16 m ²	2014	Museum Siginjai	Pembuatan	107.050.000	baik
7	Gedung MPRJ	1.365.000 m ²	2007	MPRJ	HIBAH	516.358.000	baik
8	Gedung Taman Budaya Jambi	1.500 m ²	1980	TBJ	HIBAH	225.000.000	baik

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

NO	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	IKD	IKK LPPD	TARGET				REALISASI			RASIO			
						2022		2023	2024	2025	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		√			82,33	persen	83,97	85,64	87,35	83,67	84,11	85,65	1,02	1,00	1,00
2.	Predikat akuntabilitas kinerja	√	√			B 66,9	nilai	BB 68,47	BB 79,50	BB 79,95	BB 79,25	A 80,75		1,18	1,18	
3.	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat		√	√		17	persen	18	19,04	20,08	17	25	19,04	1,00	1,39	1,00
4.	Jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan		√	√	√	5	buah	5	5	5	5	5	8	1,00	1,00	1,60
5.	Jumlah benda bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang ditetapkan		√	√	√	1	buah	2	10	12	2	6	2	2,00	3,00	0,20
6.	Jumlah karya budaya		√			509	karya	542	575	608	556	639	667	1,09	1,18	1,16
7.	Persentase peningkatan pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan		√			16	Persen	20	23	28	20,08	39,5	34	1,26	1,98	1,48
						71.883	apresian	86.882	106.882	136.882	90.217	171.684	174.596	1,26	1,98	1,63
8.	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara		√	√	√	950.000	orang	1.500.000	4.500.000	5.400.000	2.309.503	3.063.142	5.056.717	2,43	2,04	1,12
9.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara		√		√	2.000	kunjungan	3.200	3.840	4.608	3.653	6.678	12.138	1,83	2,09	3,16
10	Nilai tambah ekonomi kreatif		√	√		350	juta	450	1.000	1.250	378,45	452,32	1.000	1,08	1,01	1,00
11	Persentase kontribusi PDRB sektor pariwisata	√				1,08	persen	1,08	1,21	1,25	1,05	1,09	1,10	0,97	1,01	0,91

Gambaran realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara tahun 2021-2024



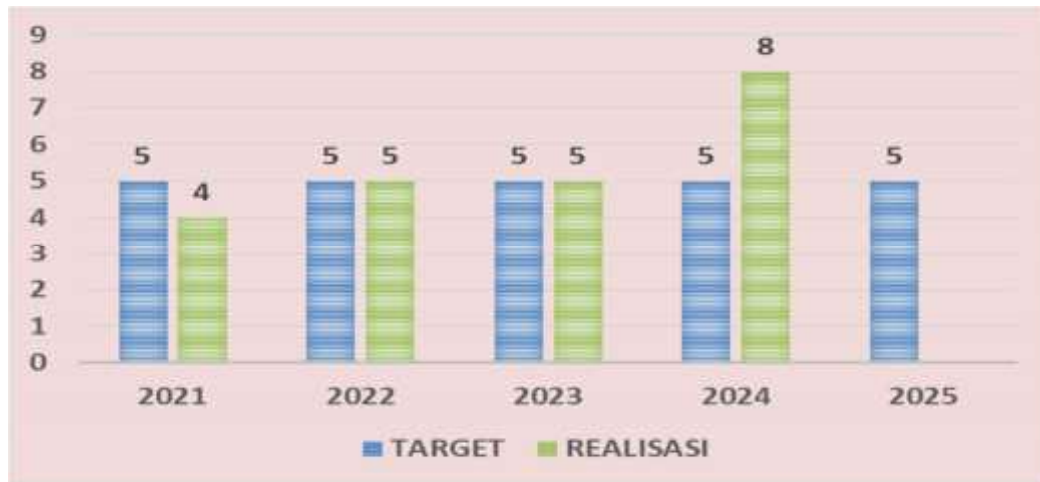
Grafik 2.2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2021-2024



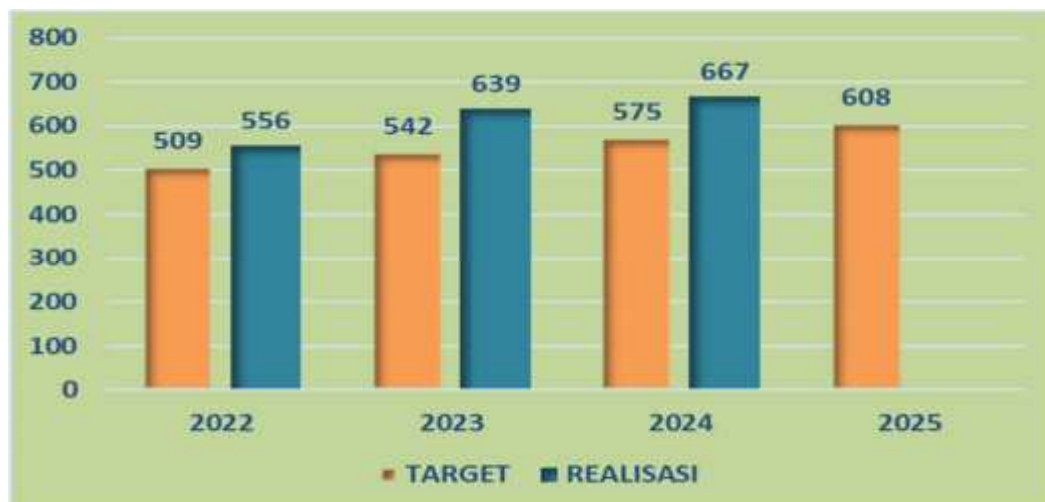
Grafik 2.3 Jumlah pengunjung/apresiasi objek pemajuan kebudayaan tahun 2021-2024



Grafik 2.4 Jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan tahun 2021-2024



Grafik 2.5 Jumlah karya budaya tahun 2021-2024



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menetapkan sejumlah kelompok sasaran layanan sebagai penerima manfaat utama dari berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan publik, fasilitasi pembangunan, dan intervensi strategis tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Penjelasan kelompok sasaran ini disusun dalam empat aspek, yaitu identifikasi, kebutuhan, bentuk layanan, dan dampak yang diharapkan. Dalam subbab ini pengelompokan kelompok sasaran dilakukan berdasarkan sektor/urusan dan sub urusan bidang yang diampu oleh Dinas.

Tabel 2.2 Kelompok Sasaran Layanan Pada Sektor Urusan Kebudayaan

No	Kelompok Sasaran	Kebutuhan Utama	Rencana Layanan	Dampak yang Diharapkan
1	Pelaku budaya dan seniman	Pengakuan, perlindungan, dukungan ekonomi dan pelatihan	- Bantuan dana dan subsidi berkala - Pelatihan - Jaminan sosial dan perlindungan hukum	- Meningkatnya keserjahteraan pelaku budaya - Terciptanya karya budaya dan pelaku budaya - Terjaganya kesinambungan tradisi
2	Komunitas adat dan masyarakat tradisional	Pengakuan hak budaya, pelestarian adat, dokumentasi budaya	- Program penguatan hukum adat - Revitalisasi ritual dan tradisi lokal - Dokumentasi dan digitalisasi budaya lokal	- Perlindungan terhadap warisan budaya lokal - Penguatan identitas budaya - Keterlibatan komunitas adat dalam pembangunan
3	Generasi muda	Edukasi budaya, ruang berekspresi, media pembelajaran yang relevan	- Integrasi budaya dalam kurikulum pendidikan - Festival seni dan pelatihan kreatif - Pengembangan media digital budaya	- Generasi muda yang sadar dan bangga terhadap budaya - Tumbuhnya kreativitas dan inovasi budaya
4	Pelaku Usaha Budaya	Akses pasar, pembiayaan, pelatihan usaha berbasis budaya	- Inkubasi dan pendampingan usaha kreatif - Pelatihan kewirausahaan budaya - Fasilitasi pembiayaan dan pemasaran	- Terwujudnya budaya sebagai sumber ekonomi - Terciptanya lapangan kerja baru - Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif
5	Masyarakat Umum	Literasi budaya, partisipasi dalam kegiatan budaya lokal, media informasi budaya	- Kampanye literasi budaya - Penyelenggaraan festival budaya keluarga - Pengembangan media komunitas berbasis budaya	- Terbentuknya masyarakat yang sadar budaya - Pesta budaya secara partisipatif - Penguatan kohesi sosial melalui budaya
6.	Penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Akses dan partisipasi dalam kegiatan budaya, pemberdayaan seni inklusif	- Peningkatan aksesibilitas fasilitas budaya - Program seni inklusif dan pelatihan kreatif - Festival budaya yang inklusif dan partisipatif	Terlaksananya ekspresi budaya

Tabel 2.3 Kelompok Sasaran Layanan Pada Sektor Urusan Pariwisata

No	Kelompok Sasaran	Kebutuhan Utama	Rencana Layanan	Dampak yang Diharapkan
1.	Wisatawan	Peningkatan informasi layanan dan fasilitas pariwisata.	Penyediaan informasi melalui Media informasi pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan
2.	Pelaku usaha pariwisata	1. Peningkatan kualitas pelayanan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata. 3. Peningkatan industri pariwisata yang tersertifikas 4. Peningkatan kualitas dan penyediaan paket wisata	1. Pelatihan SDM pariwisata. 2. Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata. 3. Sosialisasi, sertifikasi, dan fasilitasi pendampingan penerbitan perizinan berusaha 4. Fasilitasi promosi dan jaringan paket wisata	1. Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata. 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Pariwisata. 3. Meningkatnya industri pariwisata yang terdaftar dalam perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. 4. Meluasnya cakupan promosi pariwisata
3.	Masyarakat lokal	Peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal.	Pelatihan, pendampingan dan pembinaan pada masyarakat lokal.	Meningkatnya kualitas layanan dan keterlibatan masyarakat lokal.
4.	Pemerintah	Peningkatan alokasi anggaran sektor pariwisata.	Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan promotor pariwisata.	Terselenggaranya urusan pariwisata.
5.	Investor	Iklim investasi yang kondusif	Profil investasi pariwisata.	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata.
6.	Pelaku pariwisata	Peningkatan kualitas SDM, promosi, serta akses ke pasar pariwisata	Pelatihan SDM pariwisata, fasilitasi sertifikasi, promosi destinasi	SDM pariwisata kompeten, peningkatan kualitas layanan destinasi
7.	Komunitas pariwisata	Penguatan kelembagaan, pelatihan dan jejaring destinasi	Pembinaan, forum jejaring	Komunitas aktif dan mampu mendorong daya saing destinasi lokal
8.	Pelaku ekonomi kreatif	Penguatan usaha, pemasaran, akses pembiayaan dan kurasi produk	Pelatihan digital marketing, bantuan promosi, fasilitasi pameran, pelatihan HKI	Produk ekonomi kreatif lokal kompetitif dan naik kelas di pasar nasional
9.	Kreator dan inovator (seniman, desainer, content creator, dll.)	Dukungan penciptaan karya, perlindungan HKI	- Pelatihan peningkatan kapasitas kreatif dan teknis - Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - Pengembangan platform distribusi (marketplace, studio kolaboratif, digitalisasi)	- Karya kreatif yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi - Terlindunginya hak cipta dan kekayaan intelektual kreator - Perluasan pasar bagi produk kreatif lokal
10	Komunitas kreatif dan inkubator lokal	Infrastruktur pendukung, jejaring kerja, kelembagaan	- Program kolaborasi antar komunitas dan antar sektor - Pendampingan kelembagaan dan akses ke program pemerintah	- Terbentuknya ekosistem kreatif berbasis komunitas - Inovasi kolaboratif antar pelaku ekonomi kreatif. - Peningkatan inklusi dan partisipasi masyarakat kreatif

No	Kelompok Sasaran	Kebutuhan Utama	Rencana Layanan	Dampak yang Diharapkan
11.	Pemerintah daerah dan regulator terkait ekonomi kreatif	Tata kelola, sinkronisasi kebijakan, program dukungan daerah	- Pendampingan penyusunan regulasi dan program ekonomi kreatif daerah - Peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi jejaring - Integrasi program pusat-daerah dan data pelaku ekonomi kreatif	- Tumbuhnya ekosistem kreatif berbasis potensi lokal - Harmonisasi kebijakan ekonomi kreatif nasional dan daerah

Mitra Disbudpar Provinsi Jambi dalam pemberian pelayanan adalah:

1. Dinas Kominfo Provinsi Jambi, dalam penyediaan informasi publik.
2. Dinas yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota dalam informasi dan regulasi terkait kepariwisataan.

Tabel 2.4 Kelompok Penerima Layanan Lintas Sektor / Lintas Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

No	Kelompok Sasaran	Kebutuhan Utama	Rencana Layanan	Dampak yang Diharapkan
1	2	3	4	5
1.	Kelompok/komunitas pariwisata	Fasilitasi layanan peningkatan kompetensi; pelatihan promosi, digitalisasi	Pendampingan komunitas/ kelompok penggiat pariwisata, pelatihan dan manajemen tata kelola, pelatihan digitalisasi dan pendampingan jaringan kerjasama	Peningkatan kualitas daya tarik wisata, SDM pariwisata. Meluasnya jaringan kerjasama dan promosi, dalam ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat lokal
2.	Masyarakat disabilitas (berkebutuhan khusus), lansia	Fasilitasi layanan pada peningkatan sarana dan prasarana wisata	Penyediaan sarana dan prasarana [ada daya tarik wisata, pelatihan pendamping khusus, informasi pada promosi khusus disabilitas	Pemerataan manfaat dari pengembangandan pembangunan pariwisata dirasakan semua pihak.
3	Pelaku budaya, seniman, komunitas adat, generasi muda, pelaku usaha budaya, dan masyarakat umum	Pengakuan, perlindungan hukum dan sosial, dukungan ekonomi, pelatihan, ruang ekspresi, serta	Fasilitasi berupa bantuan dana, program pelatihan dan pendampingan, penyelenggaraan festival budaya, digitalisasi warisan budaya, penguatan	Terbangunnya masyarakat yang sadar budaya, meningkatnya kesejahteraan pelaku seni, terjaganya kesinambungan tradisi, serta penguatan

No	Kelompok Sasaran	Kebutuhan Utama	Rencana Layanan	Dampak yang Diharapkan
		media literasi budaya	lembaga adat, serta integrasi nilai budaya dalam pendidikan formal.	kohesi sosial berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
4.	Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Fasilitasi akses permodalan, perizinan, pendaftaran HKI	Pendampingan pengurusan perizinan hasil karya, produk dan promosi	Terciptanya pertumbuhan ekonomi dibidang usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Subbab ini menguraikan permasalahan utama serta isu-isu strategis yang menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sektor kebudayaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Permasalahan yang diidentifikasi bersumber dari hasil evaluasi kinerja lima tahun terakhir, temuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta hasil analisis lingkungan strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Selain permasalahan pada isu sektoral yang bersifat internal, terdapat pula berbagai isu-isu regional dan lintas sektoral yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik Disbudpar, termasuk ketimpangan wilayah, kerentanan sosial-ekologis, dan keterbatasan daya dukung lingkungan. Adapun isu strategis dalam subbab disusun dan dirumuskan untuk merespons permasalahan-permasalahan tersebut agar menjadi pijakan dalam menyusun arah pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Jawa Timur selama lima tahun ke depan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif selama lima tahun terakhir menunjukkan sejumlah capaian positif, namun masih menyisakan berbagai persoalan strategis yang perlu segera direspons secara sistematis. Permasalahan tersebut muncul baik dari dinamika internal penyelenggaraan urusan Disbudpar, maupun dari pengaruh eksternal berupa ketimpangan wilayah dan isu terkait lingkungan hidup, yang mana hal ini menjadi perhatian penting dalam dokumen RPJMD dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS). Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Permasalahan Regional Terkait Disbudpar

Permasalahan regional yang paling menonjol dan memiliki dampak luas terhadap bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi adalah urbanisasi tanpa pendekatan budaya lokal. Proses urbanisasi yang berlangsung pesat di berbagai wilayah Jambi memang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, namun pada saat yang sama justru mengikis identitas budaya dan melemahkan daya dukung ekosistem budaya lokal.

Dalam banyak kasus, pembangunan wilayah masih berorientasi pada aspek ekonomi dan fisik semata, sementara dimensi sosial-budaya sering terabaikan. Akibatnya, berbagai ruang budaya yang dahulu menjadi wadah ekspresi masyarakat, seperti balai adat, taman budaya, situs sejarah, hingga ruang publik tradisional semakin terpinggirkan oleh proyek-proyek komersial dan tata ruang modern. Pergeseran ini tidak hanya mengubah lanskap fisik kota, tetapi juga menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi roh kehidupan masyarakat Jambi.

Kondisi tersebut menimbulkan homogenisasi budaya, di mana kekayaan identitas lokal tersisih oleh budaya populer global. Generasi muda semakin jauh dari akar tradisi, karena akses terhadap ruang dan kegiatan budaya semakin terbatas. Pelaku seni dan komunitas budaya kehilangan ruang ekspresi, sementara partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi menurun akibat tekanan ekonomi dan perubahan gaya hidup urban.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya keaslian dan daya tarik wisata berbasis budaya. Banyak destinasi wisata di Jambi yang kehilangan karakter khasnya karena lebih menonjolkan fasilitas modern ketimbang kekuatan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengembangan pariwisata—antara daya tarik budaya dan kebutuhan pasar modern—yang pada akhirnya mengurangi potensi Jambi untuk bersaing sebagai destinasi wisata berkarakter.

Permasalahan ini berakar pada lemahnya integrasi antara kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan kebudayaan. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menempatkan budaya sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, melainkan masih sebatas sektor pendukung. Selain itu, minimnya pelibatan masyarakat adat, pelaku budaya, dan komunitas lokal dalam proses perencanaan ruang turut memperburuk situasi, karena nilai-nilai lokal tidak terakomodasi secara memadai dalam kebijakan publik

Dalam konteks ini, Disbudpar Provinsi Jambi menghadapi tantangan strategis untuk menata kembali arah pembangunan berbasis budaya. Upaya ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam tata kelola pembangunan wilayah, revitalisasi kawasan bersejarah dan ruang publik budaya, serta penguatan partisipasi komunitas adat dan pelaku seni dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, pariwisata harus dikembangkan secara berkelanjutan dengan menjadikan budaya dan lingkungan sebagai fondasi utama, bukan sekadar daya tarik tambahan.

Dengan demikian, permasalahan regional yang dihadapi Disbudpar bukan sekadar soal infrastruktur atau ekonomi, melainkan soal hilangnya keseimbangan antara manusia, budaya, dan ruang hidupnya. Urbanisasi tanpa pendekatan budaya lokal telah menimbulkan degradasi ekosistem budaya dan mengancam keberlanjutan identitas Jambi. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan paradigma pembangunan baru yang menempatkan kebudayaan sebagai inti dari perencanaan wilayah dan pengembangan pariwisata. Hanya dengan cara inilah Provinsi Jambi dapat tumbuh menjadi daerah yang maju secara ekonomi, berdaya saing secara pariwisata, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokalnya.

Beberapa permasalahan regional bidang pariwisata yang memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi Disbudpar adalah:

- Penetapan *positioning* dan pendataan objek-objek/destinasi wisata yang belum dilakukan secara menyeluruh atau kumulatif mengingat objek-objek wisata tersebut banyak berada di kawasan taman nasional..

- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pariwisata yang belum memadai dikarenakan belum terciptanya pemerataan dan peningkatan infrastruktur pariwisata.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) masih berupa dokumen. Perlu adanya kesatuan persepsi dalam operasionalisasinya
- Belum ada peraturan yang mengatur pengembangan destinasi di daerah secara sistimatis.
- Koordinasi dan tata kelola yang lemah. Koordinasi antara dinas pariwisata dan dinas terkait lainnya serta pihak swasta sering tidak sinkron
- Keterbatasan diversifikasi produk wisata yang masih sangat terbatas, membuat daya tarik destinasi menjadi kurang variatif. Kualitas pelayanan wisata yang belum memenuhi standar dan disparitas pembangunan antar kawasan wisata yang mencolok.
- Kurangnya sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dimana banyak daerah belum mengintegrasikan program pariwisata dengan pengembangan ekonomi kreatif secara optimal. Produk ekonomi kreatif (seperti kuliner lokal, kriya, seni pertunjukan, fashion, atau film) sering belum dipromosikan bersamaan dengan destinasi wisata. Selain itu, koordinasi antar-dinas (pariwisata, perdagangan, UMKM, kebudayaan) masih lemah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung ekonomi kreatif, serta minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah yang menghambat pengembangan sektor ini.
- Ketidakseimbangan dan kurang terintegrasinya elemen dalam ekosistem pariwisata seperti antara sektor kuliner, akomodasi, dan pelaku ekonomi kreatif, yang menyebabkan paket wisata belum terintegrasi dengan baik untuk menjaring lebih banyak kontribusi ekonomi lokal.
- Belum tersedia ruang kreatif (creative hub), galeri, atau pusat ekonomi kreatif dan fasilitas pendukung pariwisata (akses transportasi, konektivitas internet, sarana pameran) masih terbatas.
- Banyak pelaku ekonomi kreatif belum memiliki kemampuan manajemen bisnis, pemasaran digital, atau branding produk dan kurangnya pelatihan dan pendampingan yang relevan dari dinas pariwisata atau lembaga terkait.

- Dinas kadang belum mampu memberdayakan masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan komunitas pariwisata sebagai bagian dari strategi pemasaran. Promosi sering bersifat top-down dan tidak mencerminkan kekayaan budaya atau karakter lokal.
- Anggaran promosi yang terbatas, sehingga sulit melakukan kampanye pemasaran yang luas dan berkelanjutan serta kurangnya SDM yang kompeten di bidang digital marketing, branding destinasi, dan manajemen event.

B. Permasalahan Lingkungan Hidup yang Relevan dengan Disbudpar

Lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik dan ekologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang menopang kehidupan masyarakat. Dalam konteks kebudayaan dan pariwisata, lingkungan hidup berkaitan erat dengan keberlanjutan ekosistem budaya lokal. Namun, salah satu permasalahan yang muncul di tingkat regional adalah terjadinya pengurangan daya dukung lingkungan terhadap kelestarian ekosistem budaya tersebut.

Pengurangan daya dukung ini tampak ketika ruang-ruang budaya, seperti situs sejarah, kawasan adat, dan ruang publik tradisional, semakin terdesak oleh ekspansi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada orientasi ekonomi. Alih fungsi lahan, degradasi lingkungan, dan perubahan tata ruang perkotaan mengakibatkan melemahnya kemampuan lingkungan dalam menopang praktik budaya masyarakat. Tradisi yang sebelumnya terikat dengan lanskap ekologis tertentu—misalnya ritual yang membutuhkan hutan, sungai, atau lahan pertanian—semakin sulit dijalankan akibat rusaknya kondisi alam atau hilangnya ruang yang menopang aktivitas tersebut.

Dari perspektif kebudayaan, berkurangnya daya dukung ekosistem budaya lokal juga menyebabkan penurunan kualitas interaksi sosial dan melemahnya regenerasi nilai-nilai kearifan lokal. Generasi muda yang kehilangan akses pada ruang budaya dan lingkungan pendukungnya cenderung lebih terpapar pada budaya global yang bersifat homogen, sehingga keterikatan terhadap identitas lokal berangsur memudar. Hal ini

berimplikasi langsung pada sektor pariwisata, karena daya tarik wisata berbasis budaya tidak dapat dipertahankan apabila lingkungan sosial-ekologis yang menjadi fondasinya semakin terdegradasi.

Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, fenomena ini merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya kebijakan berbasis keberlanjutan. Upaya pelestarian tidak cukup hanya dengan melindungi produk budaya, tetapi harus diarahkan pada penguatan ekosistem yang melingkupinya. Pendekatan semacam ini dapat berupa integrasi pelestarian budaya dalam kebijakan lingkungan hidup, perlindungan kawasan budaya dan ekologis, revitalisasi ruang publik tradisional, serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara manusia, budaya, dan alam.

Dengan demikian, pengurangan daya dukung ekosistem budaya lokal merupakan permasalahan lingkungan hidup yang relevan dengan peran dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Isu ini menegaskan bahwa pembangunan pariwisata dan pemajuan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian lingkungan. Hanya dengan menjaga daya dukung ekosistem budaya lokal, identitas budaya daerah dapat bertahan, dan sektor pariwisata mampu berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Pada perspektif bidang pariwisata, permasalahan lingkungan hidup yang relevan dengan Disbudpar adalah:

- Pariwisata berkelanjutan yang efektif dan transparan guna meningkatkan kepercayaan investor dan wisatawan, daya saing daerah, ramah lingkungan, bertanggung jawab dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
- Kerusakan ekosistem, penambangan liar, eksplorasi tambang yang berlebihan, pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan konsep kelestarian lingkungan terutama di daerah tujuan wisata.
- Pencemaran lingkungan, adanya peningkatan pergerakan kunjungan wisata dapat menyebabkan kerusakan/pencemaran air, udara dan lainnya apabila tidak adanya kontrol dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

- Pengelolaan limbah dan sampah yang belum efektif, dapat menyebabkan penumpukan sampah di destinasi wisata karena aktivitas pariwisata.
- Alih fungsi lahan dan atau pengrusakan hutan/alam menyebabkan rusaknya bahkan hilangnya potensi wisata dikarenakan belum memadainya sosialisasi tentang keterkaitan kelestarian alam dan pariwisata serta kurangnya kesadaran lingkungan dari masyarakat sekitar dan wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan.
- Komersialisasi budaya dan industri kreatif dan penggunaan sumber daya alam untuk kerajinan tanpa pengelolaan berkelanjutan dapat mengikis nilai-nilai lokal.
- Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga menghadapi tantangan dalam hal edukasi dan kesiapan teknologi untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui inovasi produk dan proses yang ramah lingkungan.

C. Permasalahan Sektoral

- Sektor Kebudayaan

Bidang kebudayaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di tingkat regional maupun nasional. Salah satu permasalahan sektoral yang menonjol adalah semakin berkurangnya daya dukung ekosistem budaya lokal, yang berdampak langsung pada keberlanjutan tradisi, praktik kesenian, serta identitas masyarakat.

Ekosistem budaya pada dasarnya merupakan jaringan hubungan yang melibatkan manusia, ruang hidup, nilai, dan praktik budaya. Namun, ketika ruang hidup masyarakat mengalami tekanan akibat urbanisasi, alih fungsi lahan, maupun eksploitasi sumber daya alam, maka kelangsungan praktik budaya pun terganggu. Misalnya, ritual adat yang biasanya berlangsung di kawasan hutan atau sungai tidak lagi dapat dilaksanakan secara utuh karena hilangnya lingkungan pendukung. Demikian pula, kegiatan kesenian tradisional kehilangan panggungnya akibat semakin terbatasnya ruang publik yang menyediakan wadah bagi ekspresi budaya.

Dari sisi sosial, pergeseran gaya hidup urban dan penetrasi budaya global juga mempercepat melemahnya keterikatan masyarakat terhadap tradisi lokal. Generasi muda, yang seharusnya menjadi pewaris budaya, semakin sedikit memiliki akses terhadap pengetahuan dan praktik budaya tradisional. Kondisi ini menimbulkan risiko serius berupa hilangnya kearifan lokal, erosi identitas budaya, dan menurunnya keberlanjutan warisan budaya takbenda.

Permasalahan sektoral di bidang kebudayaan ini juga berimplikasi pada lemahnya posisi budaya dalam pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan sering kali masih memandang budaya sebagai sektor pendukung, bukan sebagai fondasi pembangunan yang holistik. Akibatnya, alokasi sumber daya untuk pemajuan kebudayaan terbatas, sementara kebutuhan untuk melestarikan dan mengembangkan ekosistem budaya semakin mendesak.

Dalam konteks ini, Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis untuk mengatasi permasalahan sektoral tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada pelestarian ekosistem budaya. Hal ini mencakup upaya revitalisasi ruang-ruang budaya, pemberdayaan komunitas seni, integrasi budaya dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal. Tanpa langkah-langkah yang terarah, permasalahan sektoral di bidang kebudayaan akan terus berlanjut, dan daerah berisiko kehilangan identitasnya yang khas sekaligus daya tarik utamanya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

- Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Banyak destinasi unggulan di Jambi belum memiliki akses jalan, transportasi publik, serta fasilitas penunjang wisata yang memadai. Infrastruktur, seperti fasilitas transportasi udara, pelabuhan, dan darat yang masih tertinggal dibandingkan daerah pesaing, sehingga mempengaruhi konektivitas dan distribusi wisatawan. Selain itu, sarana prasarana destinasi pariwisata dan fasilitas umum pendukung masih terbatas, sehingga menurunkan daya saing dan kenyamanan wisatawan.

- Kurangnya diversifikasi produk wisata menjadi permasalahan yang signifikan. Sebagian besar wisatawan cenderung hanya mengunjungi satu destinasi utama, sementara destinasi lain masih belum dikembangkan secara optimal, termasuk wisata berbasis kuliner, ekowisata, dan wisata sejarah.
- Jambi belum memiliki brand pariwisata yang kuat secara nasional maupun internasional. Promosi digital dan kerja sama lintas daerah masih minim; banyak destinasi belum terdokumentasi secara profesional serta kurangnya promosi pariwisata yang sesuai dengan positioning/keunggulan.
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan masih rendah sehingga belum tercipta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*)
- Pengelolaan destinasi belum terpadu. Banyak destinasi masih dikelola secara sektor-sektor (tidak terintegrasi) antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Permasalahan tata kelola lahan (terutama di kawasan konservasi dan cagar budaya) sering menghambat investasi dan pengembangan fasilitas.
- Belum ada roadmap pembangunan parekraf yang komprehensif berbasis potensi wilayah.
- Pelaku ekonomi kreatif sulit mengakses permodalan karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan. Belum banyak lembaga keuangan yang memiliki skema pembiayaan khusus sektor kreatif.
- Minimnya creative hub, ruang kolaborasi, dan inkubator bisnis di Jambi membatasi inovasi produk dan jejaring antarpelaku industri kreatif. Infrastruktur digital (internet cepat, e-commerce) di beberapa kabupaten masih terbatas.
- Banyak pelaku usaha kreatif belum memahami strategi pemasaran digital, branding, dan hak kekayaan intelektual (HKI). Produksi masih bersifat tradisional, belum berorientasi pada pasar global dan belum banyak masuk ke pasar nasional maupun internasional karena terbatasnya promosi dan logistik.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis pada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISBUDPAR	PERMASALAHAN DISBUDPAR	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISBUDPAR	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Destinasi wisata alam, budaya, dan buatan	SDM, tata kelola destinasi pariwisata	Manajemen pengelolaan dampak aktivitas kegiatan pariwisata di kawasan wisata (KSPP) belum optimal	Perubahan iklim global, mempengaruhi keindahan alam dan keberlanjutan ekosistem	Konsep pariwisata hijau untuk mengantisipasi, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan dampak sosial ekonomi dari pertumbuhan pariwisata	Kawasan wisata rawan bencana dan minim penataan, degradasi lingkungan dan dampak negatif dari pariwisata masal	Pengelolaan wisata berbasis pelestarian dan mengangkat budaya lokal, peningkatan kualitas layanan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata
4	Strategi promosi pariwisata	Penyelenggaraan event atau festival yang menggunakan teknologi hujau	Pendahnya pengelolaan lingkungan pada event/ festival dalam meminimalisir dampak negatif pada lingkungan	Pentingnya peran serta masyarakat dan stakeholder pariwisata dalam upaya mendukung kelestarian lingkungan dan menghadapi perubahan iklim global.	Belum adanya sosialisasi yang massive terkait perubahan iklim, global, pada tatanan sosial budaya dan gaya hidup untuk mendukung pariwisata berkelanjutan	Adanya perubahan kondisi sosial, perubahan gaya hidup, bertambahnya populasi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan lapangan kerja.	Event/ festival yang mengangkat potensi masyarakat lokal, budaya dan kearifan lokal melalui penerapan teknologi hijau untuk mendukung pariwisata berkelanjutan
		Kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan promosi kepariwisataan	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan promosi pariwisata yang berkelanjutan	Adanya perubahan iklim global yang mendorong pelaksanaan promosi pariwisata berkelanjutan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adanya perubahan iklim global terutama dalam pemanfaatan ruang promosi dengan menggunakan teknologi hijau	Minimnya aturan atau regulasi terkait perubahan iklim global yang tersosialisasi	Promosi pariwisata yang berfokus pada pengembangan <i>ecotourism</i> dan kerjasama masyarakat lokal, pelibatan komunitas, masyarakat lokal, pelaku/penggerak pariwisata, media dan stakeholder melalui penerapan kerjasama dan digitalisasi
							Strategi dan taktik pemasaran dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi promosi pariwisata, seperti kemampuan destinasi, evaluasi program promosi sebelumnya, dan keadaan lingkungan eksternal makro

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISBUDPAR	PERMASALAHAN DISBUDPAR	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISBUDPAR	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5	Warisan budaya takbenda tersebar di wilayah Jambi	Terbatasnya dokumentasi dan regenerasi pelaku budaya tradisional Lemahnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam pelestarian budaya	Pengurangan daya dukung menyangkut ekosistem budaya lokal	Urbanisasi budaya dan krisis identitas lokal akibat arus budaya global	Rendahnya integrasi kebudayaan dalam sistem pendidikan nasional serta arah kebijakan nasional yang mendorong digitalisasi budaya belum menyentuh daerah	Urbanisasi tanpa pendekatan budaya lokal	Pelestarian dan revitalisasi warisan budaya Pengakuan dan perlindungan komunitas adat
6.	Event kepariwisataan	Event belum berdampak luas	Event belum secara signifikan mengangkat budaya dan kearifan lokal serta melibatkan masyarakat lokal	Event harus memiliki atraksi unik yang menarik wisatawan nasional dan internasional	Dukungan promosi nasional dan sinergi dengan kementerian	Event kepariwisataan belum dikenal luas di luar daerah	Peningkatan kualitas pengelola dan skala event kepariwisataan tahunan
7.	Komunitas adat	Perubahan fungsi lahan yang mengancam keberadaan komunitas adat dan ruang budaya	Pengurangan daya dukung menyangkut ekosistem budaya lokal	Urbanisasi budaya dan krisis identitas lokal akibat arus budaya global	Fokus pembangunan pada infrastruktur fisik sering mengesampingkan pelestarian budaya	Kurangnya kerja sama antar provinsi dalam pelestarian budaya dan ekosistem adat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya
8.	Situs dan cagar budaya	Minimnya perlindungan dan perawatan situs budaya dari kerusakan alami dan manusia	Kurangnya pengawasan terhadap perusakan situs dan cagar budaya	Perubahan iklim memengaruhi keberadaan situs dan cagar budaya	Fokus pembangunan pada infrastruktur fisik sering mengesampingkan keberadaan situs dan cagar budaya	Fragmentasi wilayah budaya karena eksploitasi sumber daya alam lintas provinsi	Integrasi pelestarian budaya dalam kebijakan pembangunan daerah Penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan daerah
9.	Museum	Persepsi museum sebagai "tempat tugas sekolah" bukan sebagai destinasi wisata atau ruang aktivitas publik	Tantangan: mengubah mindset masyarakat agar museum juga dipandang sebagai pilihan rekreasi, edukasi, dan pengalaman bagi umum.	Museum bukan sekadar tempat penyimpanan artefak statis, dan harus bertransformasi menjadi ekosistem pembelajaran yang inklusif bagi semua generasi dan komunitas	Kurangnya profesionalitas SDM, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, tata pameran yang belum modern, dan terbatasnya kreativitas program museum	Solidaritas dan kolaborasi antar museum diperlukan untuk menjawab tantangan seperti menciptakan program publik yang inklusif dan menarik serta memperkuat jangkauan museum	Program publik yang inovatif dan menarik agar tetap relevan di masyarakat yang terus berubah.

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISBUDPAR	PERMASALAHAN DISBUDPAR	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISBUDPAR	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						kepada audiens luas, termasuk generasi muda.	
10	Taman Budaya	Tantangan menjaga fungsi Taman Budaya sebagai ruang publik dan tempat berkesenian yang mendukung seniman secara berkelanjutan. Pengelolaan oleh pegawai yang berlatar belakang administrasi, bukan seni atau manajemen budaya. Masih terdapat perbedaan persepsi pada seniman lokal dalam memanfaatkan fasilitas Taman Budaya	Modernisasi dan globalisasi yang menimbulkan tantangan bagi pelaku budaya dan pengelola taman budaya dalam menjaga kelestarian seni budaya.	Masuknya budaya global membuat budaya lokal kehilangan kekhasannya dan mulai punah karena kurangnya regenerasi. Kegiatan budaya dijadikan komoditas wisata tanpa mempertimbangkan nilai aslinya.	Anak muda cenderung kurang tertarik terhadap seni tradisional. Acara budaya sering dikomersialkan tanpa mengedukasi nilai-nilai budaya secara inklusif. Kurangnya sinergi antara taman budaya, sekolah, dan komunitas	Masyarakat belum melihat taman budaya sebagai aset ekonomi dan identitas daerah. Program tidak berkelanjutan dan kurang menarik bagi wisatawan. Aktivitas taman budaya hanya ramai saat ada festival, lalu sepi kembali.	Tantangan menjaga keseimbangan antara inovasi artistik dan tradisi lokal dan konservasi elemen budaya yang terancam punah
11	Sektor ekonomi kreatif	Terbatasnya akses dan biaya untuk HKI bagi pelaku ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif belum didukung secara sistematis	Persaingan produk lokal dan luar yang lebih unggul dalam inovasi dan kualitas	Pelaku ekonomi kreatif sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.	Hanya beberapa sub sektor ekonomi kreatif yang mendapat perhatian serius. Sektor lain belum maksimal dikembangkan	Akses terhadap pendanaan dan pembiayaan. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk dan keterbatasan infrastruktur dan teknologi
12	Ruang kreatif dan pusat pembinaan pelaku kreatif	Belum banyak ruang kreatif dan program pembinaan aktif	Komunitas kreatif kurang diberdayakan	Persaingan inovasi menuntut kreativitas dan kecepatan	Perlu lebih banyak program pembinaan kreatif	Minimnya tempat atau fasilitas untuk pelaku kreatif	Pengembangan ruang kreatif dan pembinaan pelaku ekonomi kreatif

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Jambi tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT” Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat berkebudayaan yang maju dan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah”

Tujuan ini menjadi bagian integral dalam mendukung Misi 2 yaitu memantapkan daya saing daerah dan produktivitas dengan transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi dimana salah satunya adalah pariwisata serta Misi 3 yaitu memantapkan keberlanjutan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia dengan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator:

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan.
2. Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum

3.1.1. Sasaran Renstra

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana poin 3.1.1 di atas, ditetapkan tiga sasaran utama yang akan menjadi orientasi kinerja Dinas, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
2. Meningkatkan daya saing destinasi wisata dan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing

Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut meliputi:

1. Nilai dimensi ekspresi budaya
2. Nilai dimensi warisan budaya

3. Nilai dimensi ekonomi budaya
4. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
5. Persentase pemanfaatan dan perlindungan HKI produk-produk kreatif

Tujuan dan sasaran ini menjadi dasar penguatan fungsi strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam pembangunan daerah melalui:

- a. Pelindungan dan pengembangan kebudayaan berbasis komunitas,
- b. Pemanfaatan potensi pariwisata berkelanjutan, dan
- c. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang kompetitif dan berdaya saing global.

Seluruh hal tersebut dilaksanakan secara sinergis untuk mendukung arah pembangunan Provinsi Jambi yang unggul secara sosial, tangguh secara ekonomi, dan berkelanjutan secara lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						Ket	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Sasaran RPJMD yang relevan:	Terwujudnya masyarakat berkebudayaan yang maju meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)				20%	22%	25%	27%	30%	35%		
	Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital			Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum	√	√		1%	1.15%	1.32%	1.44%	1.54%	1.64		
	Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan		Nilai dimensi ekspresi budaya		√		33.23	35.24	37.26	39.29	40.32	43.39	
	Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender				Nilai dimensi warisan budaya		√		55.25	56.26	57.28	58.31	59.34	60.42	
					Nilai dimensi ekonomi budaya		√		44.30	45.11	46.14	47,17	48.19	49,23	
			Meningkatnya daya saing destinasi wisata dan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	√			4.595.145	4.955.145	5.526.719	6.097.532	6.668.346	7.239.160		
			Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan				3%	6.92%	6.92	9,16%	11.20%	12.42%		

			yang berkelanjutan dan berdaya saing	perlindungan HKI produk- produk kreatif										
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjamin ketercapaian arah pembangunan sektoral secara efektif, efisien, dan terukur, diperlukan penahapan yang sistematis terhadap strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang periode Rencana Strategis 2025–2030. Penahapan ini menjadi rujukan operasional tahunan yang mengintegrasikan kerja-kerja kelembagaan pada bidang kebudayaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif agar secara gradual dapat mendukung kinerja pembangunan daerah. Strategi penahapan ini disusun untuk menjawab dinamika tahapan pembangunan daerah tahun 2026–2030 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi. Tiap tahun memiliki fokus pembangunan makro daerah yang berbeda—mulai dari penguatan produktivitas dan kemandirian, pemerataan wilayah, pengembangan kawasan strategis, transformasi digital berkelanjutan, hingga konsolidasi capaian menuju 2045. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Disbudpar memiliki kepentingan besar untuk menerjemahkan tahapan pembangunan tersebut ke dalam kerangka kerja sektoral. Penahapan ini juga menjadi ruang afirmatif bagi pelaksanaan program prioritas daerah dan penguatan ekosistem kreatif, sekaligus memperkuat peran Disbudpar dalam menyumbang nilai tambah bagi perekonomian, menjaga keberlanjutan budaya, serta memperluas pemerataan manfaat pembangunan.

Berikut ini adalah lima tahapan pelaksanaan strategi Disbudpar Provinsi Jambi selama periode 2026–2030 yang akan menjadi peta jalan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Peningkatan tata kelola destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis komunitas (<i>community based tourism</i>) - Pendampingan SDM tata kelola destinasi, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan - Revitalisasi warisan budaya - Integrasi sistem pelaporan data budaya dan wisata - Integrasi desa wisata dalam sistim penguatan dan pemberdayaan masyarakat	- Sosialisasi, pelatihan, fasilitasi pemanfaatan teknologi digital pada destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif - Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi digital - Memperluas jangkauan pemasaran pariwisata	Inovasi produk pariwisata dan destinasi pariwisata - Kolaborasi antar sektor (antara pelaku pariwisata, komunitas seni, UMKM dan sektor ekonomi kreatif. - Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata berbasis potensi lokal (wisata tematik). - Kampanye digital dan program '<i>test the experience</i>' - Pengembangan dan pemanfaatan warisan sejarah dan budaya sebagai atraksi wisata	Pemantapan pariwisata berkelanjutan Pendampingan, monitoring dan Penguatan transformasi digital pariwisata dan ekonomi kreatif - evaluasi penerapan konsep pariwisata berkelanjutan	Konsolidasi program menuju Indonesia Emas 2045 - Penyusunan blueprint dan model kemitraan inovatif - Konsolidasi data, SDM, kelembagaan, dan regulasi sektoral - Menjadikan Kawasan Candi Muarajambi dan Geopark Merangin Jambi sebagai destinasi wisata dunia - Optimalisasi program pada Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagai pariwisata berkelanjutan - Pengutamaan konsep konsep wisata hijau (<i>green tourism</i>) dan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism</i>)

3.3. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISBUDPAR	KETERANGAN
	Sasaran RPJMD yang relevan:	Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Integrasi dan koordinasi tata kelola pemerintahan SAKIP menuju pelayanan prima	
	Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Melakukan digitalisasi UMKM dan usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif	Program pengembangan sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasis komunitas (<i>community based tourism</i>) dan teknologi digital	
	Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah			
	Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender	Mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan Geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia	Program peningkatan daya saing pariwisata unggulan melalui pelestarian warisan budaya yang berbasis potensi alam dan budaya lokal.	
		Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota	Mengangkat potensi budaya lokal sebagai atraksi utama event pariwisata. Meningkatkan event-event daerah dan produk wisata unggulan. Program seni budaya yang inklusif dan partisipatif Mendorong tumbuhnya ruang kreatif di daerah melalui pemberdayaan seluruh sub sektor ekonomi kreatif	
		Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi	Program peningkatan kualitas destinasi wisata daerah berbasis potensi lokal melalui penerbitan regulasi yang memiliki payung hukum, peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan profesional dan promosi terpadu	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISBUDPAR	KETERANGAN
		Mengembangkan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal	Program pengembangan destinasi pariwisata unggulan. Menjadikan museum sebagai ruang publik dalam rangka peningkatan pergerakan dan kunjungan wisatawan Optimalisasi fungsi Taman Budaya sebagai ruang ekspresi pelaku seni	
		Membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan	Pengembangan destinasi berwawasan lingkungan dengan memadukan konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengendalian dampak ekologis pariwisata. Mendorong pertumbuhan dan penguatan wisata hijau dan pariwisata berkelanjutan Penyusunan analisis dan strategi pariwisata daerah Peningkatan kerjasama berbasis komunitas	
		Mengembangkan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi, Geopark Merangin dan geopark Kerinci sebagai destinasi wisata dunia	Meningkatkan kualitas sarpras, SDM yang bersertifikasi dan berstandar internasional, event pariwisata dan hasil karya kreatif Meningkatkan kerjasama promosi yang bersifat internasional. Membuat blueprint/masterplan kawasan pariwisata prioritas	
		Mendorong geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh	Menyiapkan dokumen pendukung. Sosialisasi manfaat geoheritage Kerinci-Sungai Penuh dalam rangka menjadi geopark nasional.	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISBUDPAR	KETERANGAN
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas festival dan lomba budaya daerah	Penguatan identitas budaya melalui penyelenggaraan kegiatan budaya yang sistematis, inklusif, dan berdampak luas bagi promosi kebudayaan serta pelestarian nilai-nilai lokal	
		Meningkatkan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah	Penguatan kelembagaan adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelestarian budaya, pemajuan nilai-nilai kearifan lokal, serta penyalur aspirasi masyarakat adat.	
		Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat	Pelestarian nilai-nilai budaya daerah melalui pendidikan karakter dan pengenalan sejarah serta adat istiadat kepada generasi muda, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga adat.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Bab III, maka Bab IV ini menyajikan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi selama periode perencanaan tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan program dan kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada kerangka kerja pembangunan jangka menengah, mempertimbangkan keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya, serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam bab ini disusun secara sistematis untuk menjawab isu strategis sektoral serta menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, Bab IV juga memuat indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan yang akan digunakan dalam mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, baik dalam forum RKPD maupun pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen ini mencerminkan pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Disbudpar Provinsi Jambi. Kegiatan diformulasikan tidak hanya untuk memperkuat sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, namun juga memperhatikan aspek tata kelola internal, pengelolaan SDM, pemanfaatan TIK, serta pencapaian standar kinerja birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam agenda reformasi birokrasi daerah. Secara struktural, tabel-tabel dalam Bab IV ini memuat daftar program, kegiatan, sub

kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahunan untuk kurun waktu 2025–2030. Harapannya, dokumen ini menjadi pedoman implementatif yang operasional, terukur, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Jambi yang berbudaya maju, unggul dalam daya saing pariwisata, serta adaptif dalam pengembangan ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran RPJMD yang relevan: Terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan berbasis digital	Terwujudnya masyarakat berkebudayaan yang maju dan meningkatnya nilai tambah pariwisata serta ekonomi kreatif				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum		
Meningkatnya skala ekonomi masyarakat dan daerah Meningkatnya sumber daya manusia terdidik, berkebudayaan maju dan berkesetaraan gender		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan			Nilai dimensi ekspresi budaya Nilai dimensi warisan budaya Nilai dimensi ekonomi budaya		
		Meningkatnya daya saing destinasi wisata dan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah			Jumlah pergerakan wisatawan nusantara		

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing			Persentase pemanfaatan dan perlindungan HKI produk-produk kreatif		
			Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3. Hasil monev keterbukan informasi badan publik kategori perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun lengkap	1. Persentase realisasi keuangan 2. Persentase indikator program yang tercapai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Dokumen administrasi keuangan tersusun lengkap	Jumlah laporan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian tersedia dan terdokumentasi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen kepegawaian tersedia dan terdokumentasi	Jumlah dokumen kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen ketatausahaan tersedia dan terdokumentasi	Jumlah dokumen ketatausahaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen pengadaan barang milik daerah tersedia dan terdokumentasi	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah yang tersedia dan terdokumentasi	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen pemeliharaan barang milik daerah tersedia dan terdokumentasi	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya lokal.		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Objek pemajuan kebudayaan dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah peserta pembinaa SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				Pelaku kesenian tradisional mendapat pembinaan dan didukung keberlanjutannya	Persentase pelaku kesenian tradisi yang dibina dan diberi penghargaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional		
					Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Lembaga adat mendapat fasilitasi dukungan kegiatan	Persentase fasilitasi lembaga adat	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
					Jumlah SDM, lembaga, dan pranata adat yang dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
					Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
			Meningkatnya kapasitas seniman tradisional		1. Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan 2. Persentase peningkatan apresiasi di Taman Budaya Jambi	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Pelaku kesenian ditingkatkan kompetensi dan kapasitas tata kelola lembaganya	Persentase masyarakat yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitas tata kelola lembaganya	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	
					Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan latihan (ditingkatkan kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Kesenian Tradisional	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah SDM kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	Standarisasi dan sertifikasi SDM kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	
					Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Persentase tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Dokumen sejarah terinventarisir dan dimanfaatkan	Persentase sejarah lokal yang terinventarisir	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	
					Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dipublikasikan	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	
					Jumlah penulisan sejarah lokal Jumlah dokumen hasil penulisan sejarah lokal"	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		- Persentase cagar budaya yang ditetapkan - Persentase cagar budaya yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Cagar budaya ditetapkan, dikelola dan dilindungi sesuai	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				kewenangan provinsi			
					Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah warisan budaya tak benda yang diusulkan	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
				Cagar budaya peringkat provinsi dikelola sesuai kewenangan provinsi	Persentase cagar budaya peringkat provinsi yang dikelola	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
					Jumlah objek cagar budaya yang diregistrasi	Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
				Tersedianya surat izin membawa cagar budaya keluar provinsi	Persentase cagar budaya yang mendapat izin keluar provinsi	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Provinsi	
					Jumlah objek cagar budaya yang mendapatkan perizinan keluar daerah provinsi	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Provinsi	
			Meningkatnya tata kelola museum provinsi		Persentase peningkatan pengelolaan museum provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			yang profesional dan edukatif				
				Koleksi museum dirawat dan dikelola sesuai standar pengelolaan museum	Persentase koleksi museum provinsi yang terawat	Pengelolaan Museum Provinsi	
					Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
					Jumlah SDM permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
					Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
					Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
			Meningkatnya daya tarik dan kualitas destinasi pariwisata		Persentase kunjungan wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Daya tarik wisata provinsi dikelola untuk mendukung kunjungan wisata	Persentase daya tarik wisata provinsi yang dikelola	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah lokasi daya tarik wisata unggulan provinsi	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					evaluasi pengelolaan daya tarik wisata provinsi		
					Jumlah lokasi daya tarik wisata provinsi yang dilakukan pengadaan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah pengelola daya tarik wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata provinsi	
				Kawasan strategis pariwisata provinsi difasilitasi dan dikembangkan	Persentase peningkatan kawasan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			Destinasi pariwisata provinsi dikelola secara terpadu dan berkelanjutan		Persentase destinasi pariwisata provinsi yang dikelola	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah edstinasi pariwisata provinsi yang ditetapkan	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata yang tersedia dan terpelihara	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabiitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah okumen perencanaan destinasi pariwisata MICE provinsi	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	
					Jumlah dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	
					Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	
					Jumlah kegiatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Usaha pariwisata diberikan edukasi dan fasilitasi standarisasi	Persentase penetapan TDUP lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah Tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No. 13 tahun 2020 dan SNI 9042.2021) dalam melaksanakan standar	
					Jumlah industri/usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
					Jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata provinsi	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	
			Meningkatnya cakupan pemasaran pariwisata		Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Promosi pariwisata dilaksanakan di dalam dan luar negeri	Persentase promosi pariwisata yang dilaksanakan baik didalam dan luar negeri	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Monitoring dan evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
					Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya pemanfaatan dan perlindungan hukum atas produk kreatif daerah	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Dokumen pengembangan ekraf tersedia sebagai arah kebijakan daerah	Jumlah dokumen pengembangan ekonomi kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif berbasis kekayaan Intelektual	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	
					Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	

NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				SDM pariwisata dan ekraf meningkat kapasitas dan profesionalismenya	Persentase peningkatan kapasitas SD pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi di bidang ekonomi kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perpanjangan lisensi asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang difasilitasi sertifikasi kompetensi profesi subsektor ekonomi kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai SAKIP 3. Hasil monev keterbukan informasi badan publik kategori perangkat daerah	82,67 A (80,35) 24		82,75 A (80,40) 61		82,85 A (80,45) 65		82,95 A (80,45) 70		83,05 A (80,50) 75		83,15 A (80,55) 80		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase realisasi keuangan	95,40		100	520.000.000	100	545.000.000	100	570.000.000	100	595.000.000	100	620.000.000	
	2. Persentase indikator program yang tercapai	100 persen	100	100		100		100						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	6	200.000.000	6	210.000.000	6	220.000.000	6	230.000.000	6	240.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	4	150.000.000	4	155.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	4	180.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	4	laporan	4	170.000.000	4	180.000.000	4	190.000.000	4	195.000.000	4	200.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	14	bulan	14	16.100.000.000	14	16.250.000.000	14	16.300.000.000	14	16.350.000.000	14	16.400.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	orang/ bulan	150	16.100.000.000	150	16.100.000.000	150	16.100.000.000	150	16.100.000.000	150	16.100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun	100	persen	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	400.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana	100	persen	100	220.000.000	100	225.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	235.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	paket	170	140.000.000	170	145.000.000	170	145.000.000	170	145.000.000	170	145.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	orang	35	80.000.000	35	80.000.000	35	85.000.000	35	85.000.000	35	90.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100	persen	100	1.340.000.000	100	1.465.000.000	100	1.670.000.000	100	1.679.000.000	100	975.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	paket	17	140.000.000	17	150.000.000	17	200.000.000	17	250.000.000	17	30.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	paket	9	250.000.000	9	270.000.000	9	300.000.000	9	320.000.000	9	35.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	paket	9	400.000.000	9	420.000.000	9	450.000.000	9	470.000.000	9	50.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	12	100.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	14.000.000	12	160.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	12	250.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	laporan	160	300.000.000	160	350.000.000	160	400.000.000	160	400.000.000	170	450.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KET	
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	0	persen	100	1.600.000.000	100	1.580.000.000	100	1.300.000.000	100	210.000.000	100	570.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit	4	800.000.000	4	680.000.000	2	650.000.000	5	100.000.000	6	450.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	unit	30	800.000.000	30	900.000.000	30	650.000.000	30	110.000.000	30	120.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100	persen	100	1.080.000.000	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35	laporan	35	780.000.000	35	800.000.000	40	850.000.000	40	900.000.000	45	950.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	300.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100	persen	100	2.575.000.000	100	3.730.000.000	100	4.265.000.000	100	4.735.000.000	100	4.800.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	54	unit	54	450.000.000	54	490.000.000	60	495.000.000	60	565.000.000	62	600.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7	unit	7	2.000.000.000	7	3.100.000.000	7	3.600.000.000	8	4.000.000.000	8	4.000.000.000	
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	unit	60	125.000.000	60	140.000.000	60	170.000.000	70	170.000.000	80	200.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	95	persen	100	4.050.000.000	100	4.700.000.000	100	5.650.000.000	100	6.400.000.000	100	7.250.000.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan, SDM pranata dan lembaga kebudayaan yang dibina	7	persen	19	1.400.000.000	20	1.700.000.000	21	2.000.000.000	22	2.400.000.000	23	2.700.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2	objek	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	1.100.000.000	2	1.200.000.000	2	1.300.000.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaa SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	200	orang	540	500.000.000	550	700.000.000	560	900.000.000	570	1.200.000.000	580	1.400.000.000	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kab/Kota	Persentase pelaku kesenian yang dibina dan diberi penghargaan	50	persen	10	850.000.000	10	1.000.000.000	10	1.150.000.000	10	1.300.000.000	10	1.500.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan	5	objek	5	350.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	5	500.000.000	5	550.000.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan hasil pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	1	laporan	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan	5	sertifikat	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi	1	lembaga	1	1.800.000.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	2.700.000.000	1	3.050.000.000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan	3	objek	3	570.000.000	3	600.000.000	3	650.000.000	3	700.000.000	3	750.000.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM, lembaga, dan pranata adat yang dibina	450	orang	475	1.200.000.000	500	1.300.000.000	525	1.700.000.000	550	1.800.000.000	575	2.100.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana lembaga adat yang disediakan/ difasilitasi	5	unit	4	30.000.000	73 ⁸	100.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KET	
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	5	persen	40	1.200.000.000	50	1.400.000.000	60	1.600.000.000	70	1.800.000.000	80	2.000.000.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	Persentase masyarakat yang ditingkatkan kompetensi dan kapasitas tata kelola lembaganya	5,1	persen	5,40	1.200.000.000	5,50	1.400.000.000	5,60	1.600.000.000	5,70	1.800.000.000	5,80	2.000.000.000	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan latihan (ditingkatkan kompetensinya)	250	orang	260	400.000.000	270	500.000.000	280	600.000.000	290	700.000.000	300	800.000.000	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	35	lembaga	40	800.000.000	45	900.000.000	50	1.000.000.000	55	1.100.000.000	60	1.200.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pelestarian sejarah lokal provinsi	16,2	persen	16,2	300.000.000	16,6	400.000.000	16,6	400.000.000	16,99	500.000.000	17,39	600.000.000	100
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase penyebaran informasi sejarah lokal provinsi	16,2	persen	16,2	450.000.000	16,6	850.000.000	16,6	950.000.000	16,99	950.000.000	17,39	1.100.000.000	100
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	40	orang	40	300.000.000	40	300.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	40	400.000.000	240
Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dipublikasikan	0	dokumen	0	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	2	400.000.000	5
Fasilitasi Peningkatan penulisan sejarah lokal	Jumlah penulisan sejarah lokal/Jumlah dokumen hasil penulisan sejarah lokal	1	karya tulis	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	8

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	25	persen	9	1.050.000.000	13	1.410.000.000	14	1.580.000.000	17	1.700.000.000	22	2.050.000.000	100
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	29	persen	7	350.000.000	11	460.000.000	14	580.000.000	18	700.000.000	21	850.000.000	100
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah ODCB yang didaftarkan	75	objek	75	150.000.000	100	160.000.000	125	180.000.000	150	200.000.000	175	250.000.000	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	8	objek	2	200.000.000	3	300.000.000	4	400.000.000	5	500.000.000	6	600.000.000	28
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase cagar budaya peringkat provinsi yang dikelola	23	persen	10	700.000.000	15	950.000.000	15	1.000.000.000	17	1.000.000.000	20	1.200.000.000	100
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang diregistrasi	5	cagar budaya	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	4	400.000.000	20
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	5	cagar budaya	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	4	400.000.000	20
Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan	1	cagar budaya	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8
Pembinaan dan Peningkatan kapasitas tenaga Pelestari cagar budaya	Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	4	orang	30	200.000.000	30	250.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	14	persen	2,54	1.388.000.000	18	1.650.000.000	20	1.850.000.000	22	2.050.000.000	24	2.250.000.000	
Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah kunjungan museum	51.000	orang	55.500	1.388.000.000	56.000	1.650.000.000	56.500	1.850.000.000	57.000	2.050.000.000	57.500	2.250.000.000	
Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	690	unit	820	400.000.000	845	425.000.000	870	450.000.000	895	475.000.000	920	500.000.000	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	12	orang	12	328.000.000	13	400.000.000	14	450.000.000	15	500.000.000	16	550.000.000	
Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	51.000	orang	55.500	400.000.000	56.000	425.000.000	56.500	450.000.000	57.000	475.000.000	57.500	500.000.000	
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	3	unit	3	260.000.000	3	400.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000	3	700.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kualitas daya tarik destinasi pariwisata	12 %	persen	20 %	4.620.000.000	20 %	5.800.000.000	20 %	6.460.000.000	20 %	7.060.000.000	20 %	7.730.000.000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	persentase peningkatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi	0	persen	20%	750.000.000	20%	930.000.000	20%	1.110.000.000	20%	1.290.000.000	20%	1.470.000.000	
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi daya tarik wisata unggulan provinsi	0	lokasi	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	0	laporan	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	
Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah lokasi daya tarik wisata provinsi yang dilakukan pengadaan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi	0	lokasi	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata provinsi	Jumlah pengelola daya tarik wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	0	orang	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
Perencanaan daya tarik wisata provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	0	dokumen	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	43%	persen	20%	1.370.000.000	20%	1.470.000.000	20%	1.650.000.000	20%	1.770.000.000	20%	1.960.000.000	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi	0	dokumen	1	150.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	1	250.000.000	1	270.000.000	
Perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi	0	dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	0	unit	2	400.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	2	450.000.000	
Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata	0	lokasi	1	170.000.000	1	200.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000	1	290.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	0	laporan	1	50.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	
Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	230	orang	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata provinsi	0	persen	20%	1.300.000.000	20%	2.200.000.000	20%	2.500.000.000	20%	2.800.000.000	20%	3.100.000.000	
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	0	lokasi	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	dokumen	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
Pengadaan/ pemeliharaan/ rehabiitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah sarana dan prasarana pengeloaan destinasi pariwisata yang tersedia dan terpelihara	0	unit	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	lokasi	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE	0	dokumen	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	0	dokumen	0	-	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah orang pengelola pariwisata strategis provinsi yang dikembangkan	0	orang	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	0	kegiatan	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	laporan	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Industri Pariwisata yang dibina dan diawasi	15%	persen	20%	1.200.000.000	20%	1.200.000.000	20%	1.200.000.000	20%	1.200.000.000	20%	1.200.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah Tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No. 13 tahun 2020 dan SNI 9042.2021) dalam	Jumlah Usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	50	usaha pariwisata	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat	Jumlah industri/usaha pariwisata dan yang memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (tingkat menengah tinggi)	50	unit usaha	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	
Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata provinsi	0	laporan	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri dan luar negeri	23	persen	11	2.000.000.000	15	14.000.000.000	19	3.700.000.000	20	3.300.000.000	24	4.000.000.000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase cakupan pemasaran melalui media promosi (event, media elektronik, media cetak dan lain-lain)	9	persen	11	2.000.000.000	15	3.200.000.000	19	3.700.000.000	20	3.300.000.000	24	4.000.000.000	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3	Promosi	4	600.000.000	4	800.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000	8	1.200.000.000	
Monitoring dan evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	dokumen	1	600.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	400.000.000	1	600.000.000	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	3	Kegiatan	5	800.000.000	6	1.200.000.000	7	1.600.000.000	8	2.000.000.000	9	2.200.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pemanfaatan dan perlindungan HAKI produk-produk kreatif	3	persen	6,92	1.535.000.000	6,92	1.755.000.000	9,16	1.999.000.000	11,20	2.240.000.000	12,42	2.545.000.000	

BIDANG URUSAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									KET	
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	('3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	persentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	3	persen	6,92	1.535.000.000	6,92	2.935.000.000	9,16	3.269.000.000	11,20	3.600.000.000	12,42	3.995.000.000	
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	dokumen	1	300.000.000	1	330.000.000	1	369.000.000	1	400.000.000	1	445.000.000	5
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	dokumen	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	5
Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pengembangan Sistem pemasaran Ekonomi Kreatif	-	dokumen	1	250.000.000	1	275.000.000	1	310.000.000	1	345.000.000	1	375.000.000	5
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	16	orang	50	150.000.000	55	200.000.000	60	250.000.000	65	300.000.000	65	350.000.000	311
Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran Ekonomi Kreatif	1	Promosi	2	400.000.000	2	450.000.000	3	500.000.000	3	550.000.000	4	650.000.000	15
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk hasil pencatatan atas Hak Cipta dan Hak terkait, pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi	-	Produk	20	85.000.000	25	100.000.000	30	120.000.000	35	145.000.000	40	175.000.000	150
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	6	persen	14,62	1.090.000.000	17,31	1.180.000.000	20,00	1.270.000.000	22,69	1.360.000.000	25,38	1.450.000.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan	7	persen	9,23	540.000.000	10,77	570.000.000	12,31	600.000.000	14	630.000.000	15	660.000.000	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk	50	orang	55	340.000.000	60	350.000.000	65	360.000.000	70	370.000.000	75	380.000.000	
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mendapat fasilitasi pengembangan kompetensi SDM	0	orang	55	200.000.000	60	220.000.000	65	240.000.000	70	260.000.000	75	280.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	5	persen	10,77	550.000.000	13,08	610.000.000	15,38	670.000.000	17,69	730.000.000	20,00	790.000.000	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	45	orang	55,00	150.000.000	60	170.000.000	65	190.000.000	70	210.000.000	75	230.000.000	
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	0	orang	30,00	200.000.000	35	220.000.000	40	240.000.000	45	260.000.000	50	280.000.000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang difasilitasi sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	0	orang	30,00	200.000.000	35	220.000.000	40	240.000.000	45	260.000.000	50	280.000.000	

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah. Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan budaya lokal, kapasitas seniman tradisional, terjaganya kellestarian dan pengelolaan cagar budaya, meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi wisata, meluasnya cakupan pemasaran pariwisata serta pemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap produk kreatif. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, penetapan cagar budaya, pembinaan SDM, penerapan destinasi berkelanjutan, fasilitasi kekakayaan intelektual dan promosi digital

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya lokal	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningkatnya kapasitas seniman tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Kesenian Tradisional Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terjaganya kelestarian dan dan pengelolaan cagar budaya secara optimal	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
			Penetapan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
4	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya kualitas dan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	daya saing destinasi wisata	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Peningkatan Kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata provinsi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah Tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No. 13 tahun 2020 dan SNI 9042.2021) dalam melaksanakan standar Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya cakupan pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya pemanfaatan dan perlindungan hukum atas produk kreatif daerah	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Fasilitasi Kekayaan Intelektual Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Fasilitasi Kekayaan Intelektual Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran,

keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun 2025 hingga tahun 2030, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan. Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi. Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcome* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	20	22	25	27	30	35	
2	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum	%	1	1.15	1.32	1.44	1.54	1.64	
3	Nilai dimensi ekspresi budaya	angka	33.23	35.24	37.26	39.29	40.32	43.39	
4	Nilai dimensi warisan budaya	angka	55.25	56.26	57.28	58.31	59.34	60.42	
5	Nilai dimensi ekonomi budaya	angka	44.30	45.11	46.14	47,17	48.19	49,23	
6	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	pergerakan	4.595.145	4.955.145	5.526.719	6.097.532	6.668.346	7.239.160	
7	Persentase pemanfaatan dan	%	3%	6.92%	6.92	9,16%	11.20%	12.42%	

	perlindungan HKI produk-produk kreatif								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4. Indikator Kinerja Kunci

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah memerlukan pengukuran kinerja yang terstruktur, terukur dan akuntabel. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. IKK disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pembangunan dan kualitas layanan publik pada setiap urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum	%	1	1.15	1.32	1.44	1.54	1.64	
2	Nilai dimensi ekspresi budaya	angka	33.23	35.24	37.26	39.29	40.32	43.39	
3	Nilai dimensi warisan budaya	angka	55.25	56.26	57.28	58.31	59.34	60.42	
4	Nilai dimensi ekonomi budaya	angka	44.30	45.11	46.14	47,17	48.19	49,23	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kepariwisataan untuk lima tahun kedepan. Dokumen ini juga merupakan instrumen utama dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat provinsi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini merupakan bentuk penjabaran atas mandat pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2030 dan arah strategis

pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Jambi “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”

Dalam hal pengendalian dan evaluasi, dokumen ini akan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan melalui mekanisme tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja (LKjIP), serta Evaluasi Renstra pada akhir periode. Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD), serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Melalui pelaksanaan Renstra ini secara konsisten dan kolaboratif, diharapkan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif mampu menjadi motor penggerak pembangunan sosial budaya dan ekonomi Jambi

Renstra ini bukan merupakan dokumen yang bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala agar pelaksanaannya tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku budaya, pelaku pariwisata, serta masyarakat luas. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi akan terus berupaya mewujudkan program-program yang berdampak nyata, adaptif terhadap perubahan, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kami menaruh harapan besar bahwa rencana strategis ini akan menjadi pijakan kuat dalam meningkatkan kualitas layanan, pelestarian budaya, dan pengembangan sektor pariwisata yang memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata siap membawa perubahan positif yang bermakna bagi kemajuan kebudayaan dan pariwisata di masa depan.